



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## TAHUN 2024

**Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt karena berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan atas perjanjian kinerja Tahun 2024, di mana kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja merupakan kegiatan-kegiatan yang prioritas dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai media bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja organisasi.

Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang rencana strategis, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan sasaran kinerja utama tahun 2024. Pencapaian tujuan dan sasaran kinerja utama merupakan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 23 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta,



  
Sigit Wijatmoko  
NIP 1974083019931001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan Sasaran Strategis Tahun 2024. Dari 4 IKU tersebut, 3 IKU dapat tercapai 100% sedangkan 1 IKU yaitu Tingkat Partisipasi Pemilu terealisasi 95,54%. Ketidaktercapaian target Tingkat Partisipasi Pemilu dikarenakan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta, yang berdasarkan analisis lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal/di luar kendali Perangkat Daerah, antara lain: kandidat yang kurang relevan/tidak mewakili kehendak/aspirasi, kejenuhan terhadap proses politik, kurangnya tingkat kesadaran politik/skeptisisme terhadap Pilkada, trauma atas polarisasi politik, prioritas masyarakat pada faktor ekonomi dibanding mengikuti poses Pilkada.



Terdapat 6 (enam) program pendukung IKU/Sasaran Strategis Bakesbangpol Tahun 2024 dengan total anggaran Rp 989.454.881.713, realisasi Rp 982.061.548.321 (capaian 99,25%), efisiensi anggaran sebesar Rp 7.393.333.392 (0,75%), serta efisiensi output program sebesar 16,45%.



Selain itu pada Tahun 2024 Bakesbangpol memiliki Sasaran Khusus sebanyak 8 (delapan) buah dengan keseluruhannya dapat mencapai target 100%, Sasaran Operasional sebanyak 3 (tiga) buah dengan capaian 2 (dua) buah Sasaran mencapai target 100% dan 1 Sasaran yaitu "Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat" mencapai target 99,47%. Ketidaktercapaian target sasaran dikarenakan terdapat penyelesaian pengaduan masyarakat yang melewati waktu yang ditentukan.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
E. SUMBER DAYA MANUSIA .....	4
F. SARANA DAN PRASARANA .....	5
G. ASPEK STRATEGIS .....	5
H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL .....	6
I. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA .....	8
A. PERENCANAAN.....	8
1. TUJUAN DAN SASARAN .....	8
2. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	10
B. GAMBARAN UMUM RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	12
1. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 .....	12
2. PROGRAM PENDUKUNG TERKAIT .....	14
3. PERBANDINGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN RENSTRA TAHUN 2024 .....	18
4. PAGU ANGGARAN TAHUN 2024 DAN PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024 TAHUN 2024.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	19
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN .....	22
1. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA .....	22
2. PERBANDINGAN DENGAN STANDARD NASIONAL .....	22
3. ANALISIS ATAS CAPAIAN KINERJA.....	24
4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ....	27
C. PENGHARGAAN .....	30
D. REALISASI ANGGARAN .....	30
BAB IV PENUTUP .....	33
A. KESIMPULAN.....	33
B. SARAN DAN MASUKAN .....	33
Lampiran I PERJANJIAN KINERJA BAKESBANGPOL TAHUN 2024	
Lampiran II PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN ATAS KINERJA BAKESBANGPOL TAHUN 2024 PER TRIWULAN	
Lampiran III PENGHARGAAN YANG DIRAIH	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta yang sampai dengan tahun 2024 masih berstatus sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya, di mana beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang dimiliki lebih kompleks dibandingkan daerah lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, luas wilayah yang terbatas, dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Struktur masyarakat yang heterogen dengan kepentingan yang sangat majemuk menambah permasalahan, terutama dari berbagai benturan kepentingan yang sering muncul dari berbagai masalah pembangunan dan sosial kemasyarakatan, apalagi benturan atau konflik kepentingan tersebut terkadang sarat dengan muatan politik, sehingga posisi Jakarta lebih berat dan membutuhkan pengelolaan secara proposional.

Di sisi lain, kedudukan Jakarta sebagai pusat aktivitas mendorong migrasi penduduk dari luar DKI Jakarta. Dengan komposisi masyarakat yang majemuk terdiri dari berbagai etnis atau suku, adat istiadat, budaya, ras maupun agama, bukan tidak mungkin mengakibatkan terjadinya berbagai kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menghambat dan memperluas proses pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. MAKSUD

Maksud penyusunan LKIP tahun 2024 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2023 - 2026.
- 2) Untuk melakukan analisis dalam pemecahan masalah, yang bertujuan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

- 4) Menciptakan pengelolaan Pemerintahan yang efisien, bersih dan bertanggung jawab demi mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 5) Sebagai tindak lanjut atas evaluasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atas LKIP tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

### C. TUGAS DAN FUNGSI

#### 1. TUGAS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah mengemban tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### 2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol;
- c. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. perumusan kebijakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya;
- k. pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya;
- l. pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- m. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik;
- n. pelaksanaan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

### D. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu kepada Lampiran XXXVI Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tersebut, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

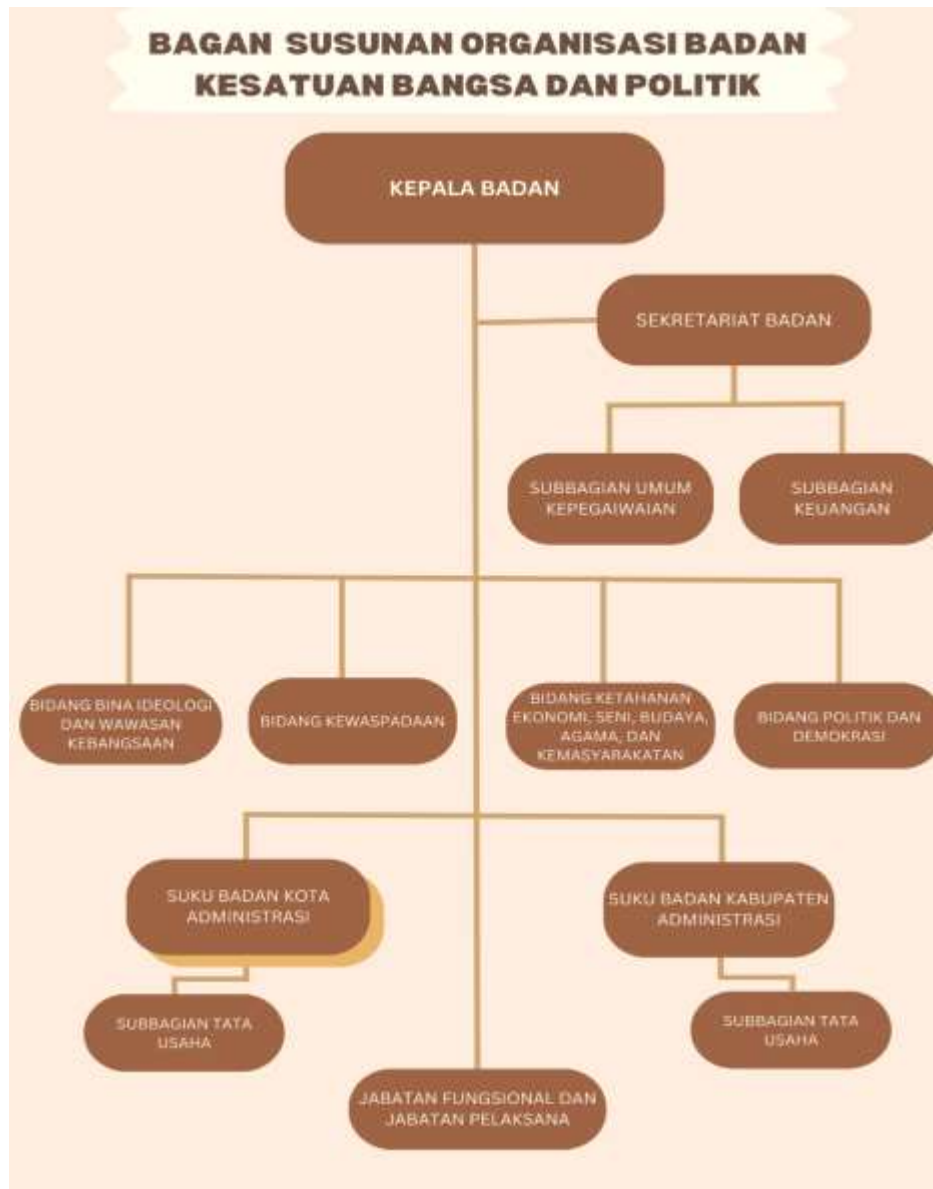
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Subbagian Keuangan
  - c) Subkelompok Program dan Pelaporan



3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:
  - a) Subkelompok Ideologi Negara
  - b) Subkelompok Pembauran Kebangsaan
  - c) Subkelompok Bela Negara
4. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari:
  - a) Subkelompok Kewaspadaan Dini
  - b) Subkelompok Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing
  - c) Subkelompok Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
  - a) Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya
  - b) Subkelompok Kerukunan Umat Beragama
  - c) Subkelompok Organisasi Kemasyarakatan
6. Bidang Politik dan Demokrasi, terdiri dari:
  - a) Subkelompok Pendidikan Budaya Politik
  - b) Subkelompok Demokrasi
  - c) Subkelompok Fasilitas Kelembagaan Politik
7. Suku Badan Kota Administrasi, terdiri dari:
  - a) Subbagian Tata Usaha
  - b) Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik
  - c) Subkelompok Kewaspadaan
  - d) Subkelompok Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
8. Suku Badan Kabupaten Administrasi, terdiri dari:
  - a) Subbagian Tata Usaha
  - b) Subkelompok Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik
  - c) Subkelompok Kewaspadaan, Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
9. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Adapun Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:





Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

#### E. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data Subbagian Umum dan Kepegawaian, pada bulan Desember 2024 pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta berjumlah 110 orang. Pegawai tersebut ditugaskan pada Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta dan 6 (enam) Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi. Penempatan pegawai di Badan yaitu berjumlah 48 orang (43,64%) dan sebanyak 62 orang (56,36%) tersebar di Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi (masing-masing pada kisaran jumlah pegawai 8-12 orang).

#### Rekapitulasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Golongan</b>		
	1. Golongan IV	14	
	2. Golongan III	77	



No	Kualifikasi	Jumlah	Keterangan
	3. Golongan II	14	
	4. Golongan I	-	
	5. Golongan IX	5	
<b>B.</b>	<b>Eselon</b>		
	1. Eselon I	-	
	2. Eselon II	-	
	3. Eselon III	8	
	4. Eselon IV	7	
	5. Eselon V	-	
	6. Ketua Subkelompok	22	
	7. Pelaksana	73	
<b>C.</b>	<b>Pendidikan</b>		
	1. S3	-	
	2. S2	18	
	3. S1 / Diploma IV	70	
	4. Diploma III	4	
	5. SLTA	18	
	6. SLTP	-	
	7. SD	-	

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, Desember 2024

Rekapitulasi formasi jabatan adalah sebagai berikut :

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang terisi
1	Eselon II	1	0
2	Eselon III	11	8
3	Eselon IV	8	7
4	Ketua Subkelompok	29	22

Sumber : Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, Desember 2024

#### F. SARANA DAN PRASARANA

Berdasarkan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Semester II Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta memiliki aset berupa kendaraan dinas operasional dan tanah/bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Operasional Mobil	12
2	Kendaraan Dinas Operasional Motor	5
3	Tanah/Bangunan	1

#### G. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:



1. Pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta  
Harmonisasi keragaman budaya, agama, suku, ras dan tradisi menjadi aspek penting dalam membangun karena adanya aspek kemajemukan di dalam masyarakat. Potensi terganggunya keamanan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi kerawanan sosial, berkembangnya paham radikalisme/terorisme, SARA, dan mengikisnya pemahaman wawasan kebangsaan. Potensi konflik yang banyak terjadi akan meresahkan dan berakibat pudarnya rasa aman di masyarakat. Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan.
2. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Jakarta  
Terwujudnya suasana partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam iklim yang demokratis yang kondusif dan terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

#### H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL

Berdasarkan surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tanggal 27 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Kesatuan dan Politik Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai 22,5% dari total bobot 25%, dengan catatan yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, dan direkomendasikan agar dilakukan peningkatan pengetahuan para pegawainya terkait implementasi SAKIP.

Terkait dengan catatan tersebut, Badan Kesatuan dan Politik Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjutinya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pergub 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP, terdapat 5 aspek SAKIP yaitu :
  - 1) Perencanaan Kinerja, meliputi Penyusunan dan Penetapan Renstra, Penyusunan dan Penetapan IKU, dan Perjanjian Kinerja (Perkin / SKP)
  - 2) Pengukuran dan pemantauan kinerja
  - 3) Pelaporan Kinerja
  - 4) Reviu dan evaluasi kinerja
  - 5) Sistem informasi kinerja
2. Badan Kesatuan dan Politik Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan pegawainya terkait implementasi SAKIP, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tanggal 7-9 Maret 2024, dengan peserta pegawai pada Badan Kesbangpol Provinsi dan Suku Badan Kesbangpol Kota/Kabupaten Administrasi. Kegiatan antara lain memberikan pengetahuan mengenai perencanaan kinerja SKPD dan penyusunan renstra (pemenuhan aspek perencanaan kinerja).
  - 2) Menugaskan pegawai dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Teknokratik Renstra Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Ditjen Polpum Kemendagri tanggal 19-21 Maret 2024. Kegiatan antara lain memberikan informasi mengenai rancangan renstra PD pengampu urusan pemerintahan umum (pemenuhan aspek perencanaan kinerja).
  - 3) Menugaskan pegawai dalam Sosialisasi Penyusunan dan Penginputan Realisasi Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja dan Penginputan Realisasi Aspirasi Masyarakat APBD TA 2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diselenggarakan oleh Bappeda (pemenuhan aspek pengukuran dan pemantauan kinerja).
  - 4) Melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihadiri oleh pegawai Bakesbangpol Provinsi dan Suku Badan Kesbangpol Kota/Kabupaten Administrasi, pada tanggal 30 November 2023. Kegiatan antara lain memberikan pengetahuan mengenai pelaporan kinerja SKPD dengan narasumber dari Biro ORB Provinsi DKI Jakarta dan



- Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri (pemenuhan aspek pelaporan kinerja).
- 5) Menugaskan pegawai pada Bimtek Penilaian Mandiri atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 tanggal 3-4 Juni 2024 (pemenuhan aspek pengukuran dan pemantauan kinerja).
  - 6) Menugaskan pegawai pada Bimtek Penyusunan LKIP PD Angkatan I Tahun 2023 tanggal 27-28 November 2023 (pemenuhan aspek pelaporan kinerja).
  - 7) Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SKP Tahun 2023 kepada pegawai Bakesbangpol Provinsi dan Suku Badan Kesbangpol Kota/Kabupaten Administrasi pada tanggal 31 Juli 2023 (pemenuhan aspek perencanaan kinerja).

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, aspek strategis, tindak lanjut hasil evaluasi internal, serta sistematika penulisan.

### BAB II IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang perencanaan kinerja serta gambaran umum rencana kinerja tahun 2024. Perencanaan kinerja meliputi: tujuan dan sasaran organisasi, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan, sedangkan gambaran umum rencana kinerja tahun 2024 meliputi: perjanjian kinerja tahun 2024, program pendukung terkait, perbandingan target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan renstra tahun 2024, serta pagu anggaran tahun 2024 dan pagu anggaran perubahan tahun 2024.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Bakesbangpol tahun 2024, analisis capaian kinerja sasaran yang memuat perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan standard nasional, analisis atas capaian kinerja, serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Selain itu disajikan juga mengenai penghargaan yang diraih pada tahun 2024 serta realisasi anggaran tahun 2024.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 serta saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024
- 2) Pemantauan dan Pengendalian atas Kinerja Bakesbangpol Tahun 2024 Per Triwulan
- 3) Penghargaan Yang Diraih



## BAB II IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

### A. PERENCANAAN

Rencana Strategis yang disusun oleh suatu Instansi Pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Instansi Pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta Pelaporan Akuntabilitas Kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, dokumen perencanaan jangka menengah DKI Jakarta yang berlaku adalah RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dengan durasi selama 4 tahun (2023–2026), di mana pada RPD tidak terdapat visi dan misi Kepala Daerah. Pemberlakuan RPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah adalah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Mengacu pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, penilaian kinerja menggunakan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) dengan berdasarkan pada 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Masukan (*input*) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) yaitu tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (*benefit*) yaitu tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.
5. Dampak (*impact*) yaitu dampaknya terhadap kondisi mikro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta telah membuat rencana strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2023–2026, dengan merujuk pada RPD DKI Jakarta 2023–2026. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai tolok ukur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencakup tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam BAB II ini.

Adapun tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

#### 1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran ditetapkan dalam Renstra PD agar apa yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam empat tahun mendatang lebih spesifik dan terukur. Kejelasan indikator pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sumber daya organisasi selama empat tahun mendatang lebih fokus dalam agenda kerjanya.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2023–2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2023–2026 serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran bersifat lebih fokus, spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun (2023–2026). Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 4 (empat) tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Renstra adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	Pembinaan ideologi, kerukunan, kemasyarakatan dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas dari segala ancaman	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	82,15	82,40	82,65	82,90
			Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat	4,88%	5,13%	5,41%	5,71%
2	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	Peningkatan Partisipasi Pemilu Lembaga Demokrasi	Nilai indikator pendidikan politik pada kader partai politik pada aspek kapasitas kelembagaan demokrasi dalam Indeks Demokrasi	67,17	67,42	67,67	67,92
			Tingkat Partisipasi Pemilu	N/A	77,75	N/A	N/A

Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu: 1) Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural dengan indikator tujuan: Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi, dengan target nilai 84,29, dan 2) Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi dengan indikator

tujuan: Nilai indikator pendidikan politik pada kader partai politik pada aspek kapasitas kelembagaan demokrasi dalam Indeks Demokrasi, dengan target nilai 100.

Sedangkan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu: 1) Pembinaan ideologi, kerukunan, kemasyarakatan dan kewaspadaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas dari segala ancaman dengan indikator sasaran: Persentase Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat, dengan target persentase 9,75% dan 2) Peningkatan Partisipasi Pemilu dengan indikator sasaran: Tingkat Partisipasi Pemilu, dengan target nilai 77,75%.

Pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024, terdapat perbedaan target dengan target Renstra pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indikator Sasaran “Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi”, target dalam Renstra adalah sebesar 82,40 indeks, sedangkan target pada Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 84,29 indeks.
- 2) Indikator Sasaran “Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi”, target dalam Renstra adalah sebesar 67,42 indeks, sedangkan target pada Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 100 indeks.
- 3) Indikator Sasaran “Persentase Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat”, target dalam Renstra adalah sebesar 5,13%, sedangkan target pada Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 9,75%.

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut merupakan hasil rekomendasi dari rapat pembahasan Perjanjian Kinerja di tingkat Asisten Sekda.

## **2. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **a. Strategi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis tahun 2023–2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan strategi:

1. Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi melalui penguatan pendidikan politik dan peningkatan citra positif lembaga dan institusi politik
2. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial dimasyarakat
3. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama
4. Peningkatan pemberdayaan ormas melalui penguatan wawasan kemandirian Ormas dan pembinaan konsep kelembagaan mandiri
5. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui penguatan ideologi pancasila
6. Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.

### **b. Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis tahun 2023–2026 tersebut perlu ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama;
2. Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan cinta tanah air;
3. Pendidikan dan pembinaan nilai-nilai pancasila;
4. Internalisasi dan penguatan implementasi nilai-nilai pancasila;
5. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air;



6. Pengembangan budaya tanah air secara kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi;
7. Meningkatkan dukungan Forkopimda;
8. Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
9. Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat;
10. Insentif bagi ormas terdaftar;
11. Penyederhanaan proses pendaftaran ormas;
12. Penguatan aturan penegakan hukum dan perangkat pencegahannya;
13. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial;
14. Penguatan budaya saling menolong dan berbagi antar kelas sosial masyarakat;
15. Pengembangan budaya kreatif dan inovatif masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja;
16. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan;
17. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya;
18. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik;
19. Meningkatkan kesadaran akan peran penting politik dalam kehidupan individu dan bernegara;
20. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat;
21. Meningkatkan keterlibatan perempuan (perspektif gender) dalam proses politik dan pembangunan;
22. Keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui sistem informasi

c. Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Strategis 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta menetapkan program kerja/kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.





## B. GAMBARAN UMUM RENCANA KINERJA TAHUN 2024

### 1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan (*Performance Plan*).

Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2024.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan ini disusun dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

#### Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		
Sasaran Strategis								
1	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	N/A	N/A	N/A	84,29	84,29	Nilai
2	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	N/A	N/A	N/A	100	100	Nilai
3	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat	N/A	N/A	N/A	9,75	9,75	Persen
4	Peningkatan Partisipasi Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilu	N/A	N/A	N/A	77,75	77,75	Persen



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		
Sasaran Khusus								
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100	100	100	Persen
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	5	25	55	100	100	Persen
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	N/A	30	N/A	80	80	Persen
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	N/A	N/A	50	50	100	Persen
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	N/A	50	N/A	100	100	Persen
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		
Sasaran Operasional								
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	Persen
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25	25	25	25	100	Persen

## 2. Program Pendukung Terkait

Berikut disampaikan daftar program yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024.

### Daftar Program Pendukung Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Yang Mendukung	Indikator Program	Target
1	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	84,29	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	51
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	51
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	51
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	51



NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Yang Mendukung	Indikator Program	Target
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4
2	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	100	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	51
3	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat	9,75	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	51
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	51
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	51
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	51
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4
4	Peningkatan Partisipasi Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilu	77,75	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	51



NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Yang Mendukung	Indikator Program	Target
				Etika Serta Budaya Politik		
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	N/A	N/A	N/A
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	N/A	N/A	N/A
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	N/A	N/A	N/A
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	51
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	51
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	51
				Program Peningkatan Kewaspadaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait	51



NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Yang Mendukung	Indikator Program	Target
				Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	51
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	N/A	N/A	N/A
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	N/A	N/A	N/A
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	N/A	N/A	N/A
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	N/A	N/A	N/A
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	N/A	N/A	N/A
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	N/A	N/A	N/A



NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Yang Mendukung	Indikator Program	Target
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	N/A	N/A	N/A

### 3. Perbandingan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Tahun 2024

Berikut disampaikan perbandingan target perjanjian kinerja Tahun 2024 dengan Renstra Tahun 2024 untuk Indikator Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama:

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Perkin 2024	Target Renstra 2024
1.	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	84,29	82,40
2.	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	100	67,42
3.	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat	9,75	5,13
4.	Peningkatan Partisipasi Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilu	77,75	77,75

### 4. Pagu Anggaran Tahun 2024 dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 pagu anggaran Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 989.712.529.213, sedangkan pagu anggaran perubahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp 989.454.881.713. Perubahan anggaran terjadi antara lain pada aktivitas Subkegiatan berikut:

- Belanja Pegawai : terjadi pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan
- Hibah Bantuan Keuangan Parpol : terjadi penambahan/pengurangan anggaran karena adanya penyesuaian nilai hibah berdasarkan hasil Pemilu terakhir;
- Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta : penambahan anggaran dikarenakan adanya amanat dari Peraturan Gubernur yang baru terbentuk;
- Fasilitasi Koordinasi dan kunjungan kerja terkait organisasi kemasyarakatan : penambahan anggaran dalam rangka penguatan tugas dan fungsi;
- Peningkatan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika : penambahan anggaran dalam rangka penguatan tugas dan fungsi;
- Dialog Interaktif Manajemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat DKI Jakarta : penambahan anggaran dalam rangka menguatkan antisipasi konflik sosial kemasyarakatan pra/pasca-Pilkada;
- Pembinaan Kepaskibrakaan Dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari Hari Besar Nasional Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu : penambahan anggaran komponen pelaksanaan kegiatan.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan rencana/target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*). Berikut disampaikan target dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	Nilai	84,29	95,69	100
2.	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	Nilai	100	100	100
3.	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat	Persen	9,75	10,81	100
4.	Tingkat Partisipasi Pemilu	Persen	77,75	74,28	95,54
5.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	100	100	100
6.	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100
7.	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100
8.	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	80	98,96	100
9.	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persen	100	100	100
10.	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	100	100	100
11.	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100
12.	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	86,59	100
13.	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
14.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	99,74	99,74
15.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100

Berdasarkan data di atas dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

**1. Indikator Kinerja : Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi**

Indikator kinerja Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi memiliki target nilai 84,29. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 95,69 nilai, dengan persentase capaian 100% dan predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**2. Indikator Kinerja : Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi**

Indikator kinerja Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi memiliki target nilai 100. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100 nilai, dengan persentase capaian 100% dan predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**3. Indikator Kinerja : Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat**

Indikator kinerja Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat memiliki target 9,75%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 10,81% dengan persentase capaian 100% dan predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**4. Indikator Kinerja : Tingkat Partisipasi Pemilu**

Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Pemilu memiliki target 77,75% Realisasi yang dicapai adalah sebesar 74,28% dengan persentase capaian 95,54% dan predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**5. Indikator Kinerja : Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program**

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program memiliki target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).



**6. Indikator Kinerja : Nilai kualitas data SDI**

Indikator kinerja Nilai kualitas data SDI memiliki target sebesar 3,25 Nilai. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 3,25 Nilai dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**7. Indikator Kinerja : Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang**

Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang memiliki target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**8. Indikator Kinerja : Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri**

Indikator kinerja Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri memiliki target sebesar 80%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 98,96% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**9. Indikator Kinerja : Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun**

Indikator kinerja Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun memiliki target 100%. Realisasi yang dicapai adalah 100% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**10. Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan**

Indikator kinerja Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan memiliki target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**11. Indikator Kinerja : Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko**

Indikator kinerja Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko memiliki target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**12. Indikator Kinerja : Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi**

Indikator kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi memiliki target 71% Realisasi yang dicapai adalah 86,59% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**13. Indikator Kinerja : Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur**

Indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur memiliki target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian "Sangat Tinggi" (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).



**14. Indikator Kinerja : Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat**

Indikator kinerja Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat memiliki target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 99,74% dengan persentase capaian 99,74%, predikat capaian “Sangat Tinggi” (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**15. Indikator Kinerja : Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)**

Indikator kinerja Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) memiliki target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 100% dengan persentase capaian 100%, predikat capaian “Sangat Tinggi” (berdasarkan tabel kriteria dalam Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017).

**B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN**

**1. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan realisasi indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja utama tahun sebelumnya, serta target indikator kinerja utama tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025	Tahun 2026
			Target Perkin	Realisasi Perkin	Capaian (%)	Target Perkin	Realisasi Perkin	Capaian (%)	Target Renstra	Target Renstra
1.	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	Nilai	82,15	84,29	100	84,29	95,69	100	82,65	82,90
2.	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	Nilai	67,17	100	100	100	100	100	67,67	67,92
3.	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat	Persen	9,75	9,75	100	9,75	10,81	100	5,41	5,71
4.	Tingkat Partisipasi Pemilu	Persen	N/A	N/A	N/A	77,75	74,28	95,54	N/A	N/A

**2. Perbandingan Dengan Standard Nasional**

IKU Bakesbangpol dengan nomor urut 1 (Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi) dan nomor urut 2 (Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi) merupakan bagian dari aspek dan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Adapun perbandingan nilai IDI DKI Jakarta Tahun 2024\* dibandingkan dengan Provinsi lainnya adalah sebagai berikut:



**Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  
Menurut Provinsi Tahun 2024\***

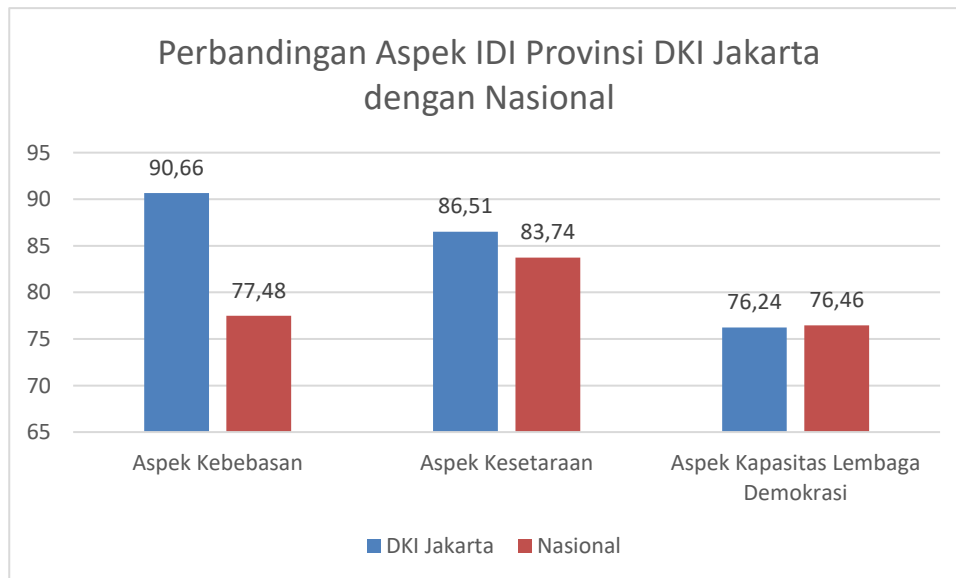
Peringkat	Provinsi	Nilai IDI
1	Bali	85,13
2	DKI Jakarta	84,57
3	DI Yogyakarta	83,88
4	Jawa Barat	83,04
5	Kalimantan Timur	82,28
6	Jawa Timur	82,01
7	Kalimantan Barat	81,69
8	Jawa Tengah	80,87
9	Kalimantan Utara	80,47
10	Kalimantan Selatan	80,44
11	Sumatera Utara	80,34
12	Gorontalo	79,71
13	Sulawesi Tengah	79,13
14	Lampung	78,37
15	Sumatera Selatan	78,17
16	Kep. Riau	77,66
17	Kalimantan Tengah	77,57
18	Aceh	77,53
19	NTT	77,39
20	Sulawesi Tenggara	77,03
21	Sulawesi Selatan	76,43
22	Sumatera Barat	76,27
23	Sulawesi Utara	76,27
24	Kep. Bangka Belitung	75,95
25	Banten	75,83
26	Riau	75,55
27	Sulawesi Barat	74,55
28	Jambi	74,47
29	Bengkulu	74,26
30	NTB	70,03
31	Maluku	69,35
32	Papua	67,64
33	Maluku Utara	65,57
34	Papua Barat	65,55

**Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta**

\* Keterangan : Definisi operasional IDI Tahun 2024 adalah nilai IDI yang diisi oleh BPS RI pada Tahun 2024, yang merupakan penilaian atas Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari total 34 Provinsi yang dilakukan penghitungan IDI nya oleh BPS RI, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi ke-2 setelah Provinsi Bali. Nilai capaian IDI DKI Jakarta tersebut berada dalam kategori Tinggi ( $> 80$ ).

**Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024\***



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Adapun dalam hal aspek IDI, capaian nilai aspek IDI Provinsi DKI Jakarta untuk aspek Kebebasan dan aspek Kesenjangan memiliki nilai yang lebih tinggi dari capaian aspek IDI Nasional, namun untuk aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi nilainya sedikit di bawah nilai Nasional.

IDI merupakan adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Provinsi. Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100 yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Hasil indeks ini diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun.

Formula penghitungan IDI dijelaskan sebagai berikut :

**(nilai aspek kebebasan x bobot aspek kebebasan) + (nilai aspek kesetaraan x bobot aspek kesetaraan) + (nilai aspek kapasitas lembaga demokrasi x bobot aspek kapasitas lembaga demokrasi).**

### 3. Analisis Atas Capaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja dari 4 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol pada Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi.

Indikator ini meliputi 3 indikator Indeks Demokrasi yaitu: 1) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara; 2) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat; 3)



Terjaminnya kebebasan berkeyakinan. Pada tahun 2024, indikator ini meraih capaian sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian target tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol misalnya melalui koordinasi pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (TNI/Polri/Kejaksaan), sosialisasi-sosialisasi dan koordinasi terkait nilai-nilai demokrasi yang melibatkan tokoh agama, perkumpulan penghayat kepercayaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi etnik, partai politik, generasi muda (pelajar dan mahasiswa), dan *stakeholder* strategis lainnya.

- b. Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi.

Indikator ini merupakan salah satu indikator dari 22 indikator Indeks Demokrasi Indonesia. Pada tahun 2024, indikator ini meraih capaian sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target Indikator ini juga tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman di bidang pendidikan politik dengan melibatkan pengurus dan anggota partai politik, termasuk juga kader perempuan partai politik.

- c. Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, keberhasilan pencapaian target Indikator ini tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol misalnya melalui pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman di bidang kewaspadaan dini, pencegahan, serta penanganan konflik dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta generasi muda (pelajar dan mahasiswa). Hal lain yang turut menghasilkan ketercapaian target kinerja adalah pembentukan Tim-Tim yang dibuat oleh Bakesbangpol, antara lain Tim Pemantauan Situasi Wilayah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

- d. Tingkat Partisipasi Pemilu.

Tingkat partisipasi pemilu didapatkan dengan menghitung jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan/atau Pilkada dibandingkan dengan jumlah masyarakat dalam Daftar Pemilih Tetap. Sebagai informasi bahwa pada Tahun 2024 dilaksanakan 5 jenis Pemilu yaitu: Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, Pemilihan Anggota DPD RI, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur. Dengan demikian tingkat partisipasi Pemilu didapatkan dengan meng-agregasi tingkat partisipasi dari kelima jenis Pemilu dimaksud.

Berdasarkan rekapitulasi yang dihimpun dengan bersumber dari KPU Provinsi DKI Jakarta, tingkat partisipasi dari lima jenis pemilihan umum dan reratanya adalah sebagai berikut:





No	Jenis Pemilu	Jmlh DPT	Jmlh Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi	Tingkat Partisipasi (Rata-Rata)
1.	Presiden-Wapres	8.252.897	6.558.734	79,47%	<b>74,28%</b>
2.	DPR RI	8.252.897	6.462.355	78,30%	
3.	DPD RI	8.252.897	6.456.022	78,23%	
4.	DPRD Prov DKI Jakarta	8.252.897	6.427.531	77,88%	
5.	Gubernur-Wagub	8.214.007	4.724.393	57,52%	

Pada keempat jenis Pemilu Nasional (nomor 1 s.d. 4), tingkat partisipasi berhasil mencapai target sebesar 77,75%. Keberhasilan pencapaian target tersebut tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, partai politik, elemen pemuda/mahasiswa/pelajar,dll.) mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Selain itu faktor keberhasilan lainnya adalah dengan optimalisasi koordinasi dengan SKPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta elemen anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk memperkuat pemahaman akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta) juga turut menjadi faktor pendukung.

Namun demikian, didapati kondisi anomali yang signifikan pada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, di mana meskipun telah dilakukan upaya-upaya yang optimal namun hasil Tingkat Partisipasi Pemilih menurun drastis. Dengan fakta bahwa upaya yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol dalam rangka mendukung Pilkada adalah sama dengan yang dilakukan dalam rangka mendukung Pemilu Nasional namun hasil tingkat partisipasi pemilih memiliki perbedaan yang signifikan, maka dapat menjadi indikasi bahwa rendahnya/menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada dipengaruhi oleh keadaan di luar kendali perangkat daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Bakesbangpol, faktor penyebabnya antara lain:

- 1) Kandidat yang kurang relevan/tidak mewakili kehendak/aspirasi
- 2) Kejenuhan terhadap proses politik
- 3) Kurangnya tingkat kesadaran politik/skeptisisme terhadap Pilkada
- 4) Trauma atas polarisasi politik
- 5) Prioritasi masyarakat pada faktor ekonomi dibanding mengikuti poses pilkada

Atas hal-hal tersebut, Bakesbangpol sesuai dengan kewenangannya akan melaksanakan upaya untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Pemilih antara lain dengan:

- 1) Peningkatan Kualitas Kandidat Peserta Pemilu/Pilkada
- 2) Penguatan Sosialisasi Pemilu
- 3) Mendukung Upaya Penegakan Hukum terhadap Isu Kecurangan
- 4) Mendukung Pemerintah Pusat dalam melakukan Upaya Perbaikan Sistem Pemilu/Pilkada Serentak.



#### 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam optimalisasi efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disampaikan strategi-strategi yang telah dilakukan Bakesbangpol sebagai berikut :

##### 1. Efisiensi terkait aspek Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan Bakesbangpol dalam terciptanya efisiensi dalam aspek SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan serta pengembangan kompetensi lainnya, baik yang bersifat *offline* maupun *online*.
- 2) Melakukan penugasan-penugasan teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol.
- 3) Melibatkan pegawai dalam penugasan lintas tugas dan fungsi sebagai upaya akselerasi peningkatan pengetahuan dan pengalaman.
- 4) Pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai secara berkala.

##### 2. Efisiensi terkait aspek Teknologi

Upaya yang dilakukan Bakesbangpol terkait terciptanya efisiensi dalam aspek Teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan aplikasi dalam pelaksanaan administrasi tata naskah dinas.
- 2) Pemanfaatan aplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Optimalisasi penggunaan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi yang terkait tugas dan fungsi Bakesbangpol.

##### 3. Efisiensi terkait aspek Anggaran

Bakesbangpol telah melakukan upaya efisiensi pada aspek Anggaran. Berdasarkan data akhir pelaksanaan anggaran Tahun 2024, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.393.333.392 atau senilai 0,75% dari total pagu anggaran Rp 989.454.881.713. Selain itu berdasarkan rumus penghitungan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 didapatkan hasil Efisiensi Output Program Bakesbangpol sebesar 16,45%. Berikut tabel hasil penghitungan Efisiensi Output Program sebagaimana dimaksud:



### Capaian Output Program

Capaian Output Program										100%
	Program	Output Program (OP)	Indikator Output Program (IOP)	Target IOP	Realisasi IOP	Realisasi IOP (%)	COP per OP	COP per Program	CP per UKE I/II	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	51	62	120,00%	120,00%	120,00%	112,92%	
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	Persentase Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	51	61,45	120,00%	120,00%	120,00%		
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	51	63,15	120,00%	120,00%	120,00%		
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	51	51	100,00%	100,00%	100,00%		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100,00%	100,00%	100,00%		
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	51	63,15	120,00%	120,00%	120,00%		

**Efisiensi Output Program**

Efisiensi Output Program									16,45%
	Program	OP	COP per OP	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP)-RA	Efisiensi	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	120,00%	17.174.288.192	16.584.414.681	20.609.145.830	4.024.731.149	16,45%	
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tingkat Pemahaman Organisasi Kemasyarakatan terkait Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	120,00%	10.099.039.624	9.029.807.493	12.118.847.549	3.089.040.056		
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	120,00%	2.083.199.664	2.075.897.324	2.499.839.597	423.942.273		
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing	100,00%	154.338.566.086	153.635.139.766	154.338.566.086	703.426.320		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	58.166.791.596	54.813.475.054	58.166.791.596	3.353.316.542		
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik	120,00%	747.592.996.551	745.922.814.003	897.111.595.861	151.188.781.858		
				989.454.881.713	982.061.548.321	1.144.844.786.519	162.783.238.198		

### C. PENGHARGAAN

Pada tahun 2024, Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan maupun berkontribusi atas didapatkannya penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan keterangan sebagai berikut:

1. Mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta atas peran aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
2. Mendapatkan penghargaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta atas dukungan atas kesuksesan pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta;
3. Sebagai SKPD yang aktif mengawal pelaksanaan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024 Dalam Rangka Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI;
4. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Tim P3DN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Peringkat I Kategori Perangkat Daerah (Inspektorat dan Badan) Atas Capaian Kinerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 dalam ajang Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

### D. REALISASI ANGGARAN

Berikut disampaikan realisasi anggaran per sasaran dan indikator kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Total Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	241.861.885.162	236.138.734.318	97,63%
2	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	747.592.996.551	745.922.814.003	99,78%
3	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat	241.861.885.162	236.138.734.318	97,63%
4	Peningkatan Partisipasi Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilu	747.592.996.551	745.922.814.003	99,78%
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis	N/A	N/A	N/A



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Total Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
	prioritas dan strategis Daerah	serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program			
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	N/A	N/A	N/A
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	N/A	N/A	N/A
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	989.454.881.713	982.061.548.321	99,25%
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	N/A	N/A	N/A
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	N/A	N/A	N/A
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	N/A	N/A	N/A
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	N/A	N/A	N/A
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	N/A	N/A	N/A
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	N/A	N/A	N/A



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Total Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	N/A	N/A	N/A





## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 memiliki 4 indikator kinerja utama, 8 indikator Sasaran Khusus, dan 3 indikator Sasaran Operasional. Berdasarkan evaluasi pada akhir tahun, semua target kinerja Bakesbangpol dapat tercapai dengan capaian kategori SANGAT TINGGI. Namun ada 2 (dua) indikator yang capaiannya tidak mencapai 100% yaitu indikator “Tingkat Partisipasi Pemilu” dan indikator “Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat”. Faktor penghambat pada indikator Tingkat Partisipasi Pemilu adalah minimnya partisipasi masyarakat pada Pilkada, yang berdasarkan analisis didominasi oleh faktor eksternal/di luar kendali Perangkat Daerah, sedangkan faktor penghambat pada indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah karena adanya aduan yang ditindaklanjuti melewati batas waktu yang ditentukan.

Pada Tahun 2024 Bakesbangpol memiliki 6 Program dengan total pagu anggaran sebesar Rp 989.454.881.713 , realisasi anggaran Rp. 982.061.548.321 (99,25%), efisiensi anggaran sebesar Rp 7.393.333.392 (0,75%), dan Efisiensi Output Program 16,45%.

### 2. SARAN DAN MASUKAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu untuk memaksimalkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta melakukan inovasi dan diversifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selain itu, untuk tahun mendatang Bakesbangpol telah merancang rencana aksi untuk ketercapaian IKU antara lain sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural;
- 2) Menyusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama);
- 3) Menyusun Naskah Akademis Rancangan Perda PIP (Pendidikan Ideologi Pancasila);
- 4) Melaksanakan Penyaluran Hibah uang untuk FKUB;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada pengurus/anggota partai politik di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi;
- 6) Melaksanakan penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman; dan
- 8) Menyusun Peta Rawan Konflik di Wilayah DKI Jakarta.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, semoga pada masa-masa mendatang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat terus ditingkatkan.



Jakarta, 23 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta,



Sigit Wijatmoko  
NIP 1974083019931001

Lampiran I PERJANJIAN KINERJA BAKESBANGPOL TAHUN 2024

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Taufan Bakri
Jabatan	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut Pihak Kesatu	
Nama	: Heru Budi Hartono
Jabatan	: Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 31 Januari 2024	
Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
Heru Budi Hartono	Taufan Bakri NIP 196406301993031006



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Tautan Bakri  
NIP : 196406301993031006  
Jabatan : Kepala Badan  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	a-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026  Definisi : Aspek Kebebasan merupakan salah satu aspek pembentuk Indeks Demokrasi yang mendefinisikan sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Capaian indikator ini diukur berdasarkan penilaian atas 3 indikator dari total 7 indikator Aspek Kebebasan yaitu : a. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara, b. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dari berpendapat antar masyarakat, c. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan  Metode Pengukuran : Nilai Tiga indikator pada Aspek Kebebasan = (nilai Indikator 1 + nilai Indikator 2 + nilai Indikator 3) dibagi 3  Sumber Data : Hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia oleh BPS RI	N/A	N/A	N/A	84,29	84,29	Nilai
2	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026  Definisi : Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi merupakan salah satu aspek pembentuk Indeks Demokrasi yang mendefinisikan sejauh mana institusi/lembaga demokrasi berfungsi dan bekerja menjamin prinsip demokrasi dalam tata kelola politik, ekonomi, dan sosial. Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai dari indikator 22 yaitu indikator pendidikan politik pada kader partai politik.  Metode Pengukuran : Nilai dari Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia  Sumber Data : Hasil penilaian Indeks Demokrasi Indonesia oleh BPS RI	N/A	N/A	N/A	100	100	Nilai



Nomor	Saaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
3	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>Definisi :</p> <p>Penurunan kejadian konflik sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Konflik sosial adalah perselisihan/pertentangan yang didasari oleh adanya perbedaan di dalam hubungan social masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang budaya, ras, perbedaan pendapat, maupun perbedaan kepentingan. Indikator Persentase Penurunan Kejadian Konflik diukur berdasarkan selisih jumlah kejadian konflik pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kejadian konflik pada tahun sebelumnya.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah kejadian konflik tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kejadian konflik tahun berjalan (n) dibagi jumlah kejadian konflik tahun sebelumnya (n-1) dikali 100%</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	9,75	9,75	Persen
4	Peningkatan Partisipasi Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilu	e-SAKIP	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p>Definisi :</p> <p>Tingkat Partisipasi Pemilu merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan demokrasi yaitu menghitung persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu dan/atau Pilkada.</p> <p>Metode Pengukuran : Capaian indikator ini dihitung berdasarkan formula Tingkat Partisipasi Pemilu = Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih dibagi jumlah masyarakat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikali 100%</p> <p>Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum</p>	N/A	N/A	N/A	77,75	77,75	Persen





Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Khusus										
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.  Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024  Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data  Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]  ( Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)  Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketepatan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketepatan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang terpvalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p>						
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 65%</p> <p>PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p>	5	25	55	100	100	Persen
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.02.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p>	N/A	30	N/A	60	60	Persen



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya  Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.  Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.  Definisi : Terselenggaranya Penuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam <a href="https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id">https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</a> Realisasi Target berupa Laporan capaian penuhi jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.  Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian penuhi jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]  Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan Pns4r BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.  Definisi : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>  Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).  Sumber Data : <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a>	N/A	N/A	50	50	100	Persen





Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan diuangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p><math display="block">\frac{(\text{Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektorat})}{(\text{Semua dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})} \times 100\%</math></p> <p>Output Sasaran :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II</p> <p>Triwulan IV :</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>	N/A	53	N/A	100	100	Persen
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Pasal 155 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian ketercapaian yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.</li> <li>Sumber Data : e-SAKIP</li> </ul> <p>2) Penyerapan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.</li> <li>Sumber Data : Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id</li> </ul> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.</li> <li>- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</li> <li>- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</li> </ul> <p>Sumber Data</p> <p>a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;</p> <p>b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan</p> <p>c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dilakukan dengan menghitung deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</li> </ul> <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bekk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bekk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>&gt; 60 s.d 70 = Cukup</p> <p>&gt; 70 s.d 90 = Baik</p> <p>&gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>						

LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
Tahun 2024



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
13	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran :  Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran :  Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran :  (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasi / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Rj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Heru Budi Hartono

Jakarta, 31 Januari 2024  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Provinsi DKI Jakarta

  
Taufiq Bekri  
NIP 196403011993031006



Lampiran II PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN ATAS KINERJA BAKESBANGPOL TAHUN 2024 PER TRIWULAN

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Capaian Triwulan				Realisasi Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Sasaran Strategis													
1	Membangun Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Multikultural	Nilai Tiga Indikator pada Aspek Kebebasan Dalam Indeks Demokrasi	N/A	N/A	N/A	84,29	84,29	N/A	N/A	N/A	85,69	85,69	Satuan : Nilai  (Tercapai 100%)
2	Mewujudkan Peran Aktif Masyarakat pada Lembaga Demokrasi	Nilai Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	Satuan : Nilai  (Tercapai 100%)
3	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	Persentase Penurunan Kejadian Konflik Sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat	N/A	N/A	N/A	9,75	9,75	N/A	N/A	N/A	10,81	10,81	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Capaian Triwulan				Realisasi Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
4	Peningkatan Partisipasi Pemilu	Tingkat Partisipasi Pemilu	N/A	N/A	N/A	77,75	77,75	N/A	N/A	N/A	74,28	74,28	Satuan : Persen  (Tercapai 95,54%)
<b>Sasaran Khusus</b>													
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Satuan : Nilai  (Tercapai 100%)



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Capaian Triwulan				Realisasi Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
7	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	5	25	55	100	100	5	39,35	67,22	100	100	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	N/A	30	N/A	80	80	N/A	57,7	N/A	98,96	98,96	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	N/A	N/A	50	50	100	N/A	N/A	50	50	100	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Capaian Triwulan				Realisasi Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	N/A	50	N/A	100	100	N/A	50	N/A	100	100	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	N/A	N/A	N/A	71	71	N/A	N/A	N/A	86,59	86,59	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)
<b>Sasaran Operasional</b>													
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	98,97	100	99,74	Satuan : Persen  (Tercapai 99,74%)



NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Capaian Triwulan				Realisasi Tahunan	Keterangan
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	Satuan : Persen  (Tercapai 100%)



**Lampiran III PENGHARGAAN YANG DIRAIH**

1. Penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta atas peran aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)



2. Mendapatkan penghargaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta atas dukungan atas kesuksesan pelaksanaan pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta



3. Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024 Dalam Rangka Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia



4. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Tim P3DN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Peringkat I Kategori Perangkat Daerah (Inspektorat dan Badan) Atas Capaian Kinerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 dalam ajang Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

